

**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN  
DESA GIRIWARNO**

**Rini Handayani<sup>1)</sup>, Suprihati<sup>2)</sup>, Wikan Budi Utami<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia,

Email : [handayanirini862@gmail.com](mailto:handayanirini862@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to examine and analyze the Influence of Allocation Management, Village Policy and Community Participation on the Development of Giriwarno Village. This research uses a quantitative descriptive approach. The technique used is primary data by means of a questionnaire distributed to respondents called a questionnaire. The data collection technique uses proportional sampling, namely the technique of determining the sample by knowing in advance the type of age or category in the population, and we will take a sample of 98 samples in this study. Based on these conclusions, Management of Village Fund Allocation has a significant positive effect on village development, while Village Policy has a significant positive effect on village development and Community Participation has a positive effect on village development. The results of further research show that Management of Village Fund Allocation, Village Policy and Community Participation jointly have a significant effect on the development of the village of Giriwarno, this is evidenced by the Multiple Linear Regression Analysis Test, F Test, t Test and Determination Test with the SPSS 23 program.*

**Keywords:** PAD, Village Policy and Community Participation.

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat di berbagai aspek, termasuk perkembangan dalam bidang pembangunan nasional. Adanya kemajuan dan perkembangan pembangunan diberbagai bidang, pemerintah melakukan berbagai pembangunan untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan Makmur. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tertera bahwa pembangunan desa memiliki tujuan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan fasilitas desa pengembangan potensi ekonomi daerah, menanggulangi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan primer, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan disertai dengan adanya penduduk dan sumber daya alam yang potensial, permasalahan tersebut hendaknya menjadi evaluasi bagi desa untuk berkembang.

Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya membutuhkan dukungan berupa dana agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Dalam memperoleh pendapatan, desa mempunyai berbagai sumber yaitu, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, hibah dan sumbangan yang tidak diwajibkan oleh pihak ketiga, dan dari alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang dibagikan kepada pemerintah desa, yang bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Menurut UU No 6 Tahun 2014 mengenai pedoman Alokasi Dana Desa dalam

pasal 71 ayat 4 menerangkan bahwa dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 10% dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi setelah dikurangi anggaran khusus. Penambahan ADD pada desa dapat dijadikan cerminan untuk mencapai *good governance*, dimana terdapat hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat melalui dorongan partisipasi masyarakat dan kebijakan desa dalam pembangunan desa.

Penggunaan anggaran dana desa rentan terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk pembangunan desa menjadi lebih canggih. Jika jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD terbilang besar, timbul pertanyaan apakah desa mampu mengelola anggaran dengan baik. Hal ini mengingat sebelumnya desa-desa yang melakukan pembangunan hanya mendapat bantuan dana yang terbatas dan pengelolaannya masih terpusat, namun setelah diberlakukannya kebijakan ADD, masing-masing desa mendapat alokasi anggaran yang besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. (Kholmi,2016).

Dari alokasi dana desa di desa Giriwarno terlihat pembangunan fisik sudah dilakukan. Penggunaan Alokasi Dana Desa seharusnya memberi manfaat dan mengutamakan kegiatan pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa Giriwarno, dipastikan adanya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang ditetapkan oleh pemerintah desa, yaitu kebijakan desa. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pembangunan harus benar-benar berjalan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (Elvina dan Musdhalifah, 2019). kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa. Selain itu, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat setempat karena peran dan partisipasi masyarakat desa Giriwarno

sangat diperlukan, dan tanpa partisipasi masyarakat desa Giriwarno maka pembangunan desa tidak akan dapat berjalan dengan baik secara optimal.

Partisipasi masyarakat yang berdaulat bagi negara ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam pembangunan desa atau berbagai kegiatan yang ada di desa. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengambil keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut yaitu : 1) Mengetahui pengaruh signifikan pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa Giriwarno. 2) Mengetahui pengaruh signifikan kebijakan desa terhadap pembangunan desa Giriwarno. 3)mengetahui pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Giriwarno.

Pada kenyataan prinsip tersebut, sumber keuangan alokasi dana desa merupakan dana pembangunan provinsi yang penting, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam pengelolaan dana yang timbul dari alokasi dana desa. Sehingga dapat mendukung program desa untuk mencapai tujuan. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang dihasilkan dari alokasi uang desa. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya yang ada dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu diketahui sejauh mana pengelolaan alokasi uang desa dalam program desa dan sejauh mana kebijakan desa dalam program desa mempengaruhi perubahan dalam program desa. pembangunan itu sendiri.

### **Tinjauan Pustaka dan Hipotesis**

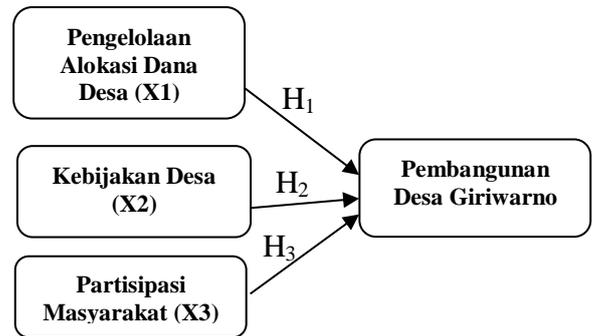
#### **1) Pembangunan desa**

Pembangunan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi

ekonomi lokal, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun tujuan pembangunan desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan musyawarah desa dan masyarakat setempat secara partisipatif untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

- 2) **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**  
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan bertanggungjawab terhadap dana desa. Bagian integral dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- 3) **Kebijakan Desa**  
Kebijakan pemerintah desa merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar dan rencana untuk melakukan tindakan, kepemimpinan, dan cara kerja dalam suatu organisasi dan pemerintahan. Adapun politik desa sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah berupa program atau sistem yang ada di desa. Kebijakan pemerintah desa memiliki kewenangan dalam undang-undang, meskipun kecil dan lingkungannya bersifat lokal yang meliputi wilayah desa itu sendiri. Kebijakan desa tertuang dalam peraturan desa yang berlaku di wilayah desa.
- 4) **Partisipasi Masyarakat**  
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, yang mempengaruhi proses penilaian dan pengendalian kinerja pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan (Putra & Rasmini, 2019). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan uang desa dapat mengontrol kinerja pemerintahan desa dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan.. Berdasarkan

tinjauan pustaka diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut

**H1: Pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa Giriwarno.**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintahan, yang timbul dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dan digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kemampuan desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya masyarakat. Kegiatan masyarakat tidak hanya membutuhkan aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H2: Pengaruh kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa Giriwarno**

Kebijakan desa adalah tentang keputusan pemerintah berupa program atau sistem yang berlaku di desa. Kebijakan pemerintah desa memiliki kewenangan dalam undang-undang, meskipun kecil dan lingkungannya

bersifat lokal yang meliputi wilayah desa itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut

**H3: Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Giriwarno**

pelaksanaan untuk kemajuan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena mengingat masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dari perencanaan, diharapkan kebutuhan dan ide masyarakat dapat disalurkan dan dipenuhi dengan baik.

**2. METODE PENELITIAN**

a. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini rata-rata berumur 15-64 tahun, penelitian ini terdiri dari perangkat desa sejumlah 12 orang, pengurus BDP(Badan Permusyawaratan Desa) sejumlah 7 orang, pengurus rukun tetangga dengan jumlah 14 orang, pengurus organisasi kepemudaan desa sejumlah 10 orang, PKK sejumlah 45 orang dan warga sejumlah 35 orang. Dalam penelitian ini maka jumlah populasi yang digunakan adalah 157 orang.

b. Data Penelitian  
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

c. Teknik Analisa Data  
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS Statistic 23. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti melakukan uji validitas, uji reabilitas, dan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, model analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y= pembangunan desa

a = Konstanta

$\beta_1$ = Koefisien regresi pengelolaan ADD

$\beta_2$ = Koefisien regresi kebijakan desa

$\beta_3$ = Koefisien regresi partisipasi masyarakat

X1= Pengelolaan alokasi dana desa

X2= Kebijakan desa

X3= Partisipasi masyarakat

E= residual

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Uji validitas**

Variabel dinyatakan reliable apabila nilai cronbach's alpha >0,60. Berdasarkan analisis Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner. Jika nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka kuesioner tersebut dinyatakan valid, tetapi jika  $R_{hitung} < R_{tabel}$ , maka kuesioner dinyatakan tidak valid. Nilai  $R_{tabel}$  untuk populasi penelitian ini sebanyak 98 responden dengan tingkat signifikasinya 0.05, maka Df dapat dihitung  $n - 2 = 98 - 2 = 96$  sehingga untuk  $R_{tabel}$  adalah 0,1922. Maka setiap pernyataan dalam kuesioner ini dapat dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

**Tabel 1.**  
**Uji Validitas**

Pengelolaan alokasi dana desa	1	0,548	0,1922	Valid
	2	0,401	0,1922	Valid
	3	0,551	0,1922	Valid
	4	0,427	0,1922	Valid
	5	0,478	0,1922	Valid
	6	0,493	0,1922	Valid
Kebijakan Desa	1	0,581	0,1922	Valid
	2	0,475	0,1922	Valid
	3	0,557	0,1922	Valid
	4	0,640	0,1922	Valid
	5	0,512	0,1922	Valid
	6	0,488	0,1922	Valid
Partisipasi Masyarakat	1	0,413	0,1922	Valid
	2	0,413	0,1922	Valid
	3	0,547	0,1922	Valid
	4	0,591	0,1922	Valid
	5	0,643	0,1922	Valid
	6	0,509	0,1922	Valid

**3.2 Uji Reabilitas**

Uji reabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner dalam penelitian. Hasil reliabilitas menggunakan kriteria nilai yaitu Cronbach Alpha dan memiliki nilai variabel Alpha > 0,60.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Reabilitas Pengelolaan ADD(X<sub>1</sub>)**

Chronbach's Alpha	N of items
0,626	6

**Tabel 3.**  
**Uji Reabilitas Kebijakan Desa(X<sub>2</sub>)**

Chronbach's Alpha	N of items
0,722	6

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Reabilitas partisipasi masyarakat (X<sub>3</sub>)**

Chronbach's Alpha	N of items
0,760	6

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reabilitas Pembangunan desa (X<sub>4</sub>)**

Chronbach's Alpha	N of items
0,627	7

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel (andal).

### 3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnow Test dengan dibantu menggunakan aplikasi SPSS 23. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka normal, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dikatakan tidak normal.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,45072013
	Absolute	0,060
	Positive	0,060
	Negative	-0,059
Test Statistic		0,060
Asymp. Sig (2-tailed)		0,200

### 3.4 Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya VIF ( *Variance Inflation Faktor* ) dan *Tolerance*.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pengelolaan alokasi dana desa	0,600	1,666
Kebijakan desa	0,482	2,074
Partisipasi masyarakat	0,699	1,431

Dari tabel 3.4 di atas menunjukkan jika nilai Tolerance variabel independen lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF variabel independen tersebut tidak mempunyai nilai kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam variabel independennya

### 3.5 Uji Autokorelasi

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,492	0,242	0,218	1,47369	1,915

Dari tabel diatas menunjukkan jika nilai Durbin-Watson sebesar 1,915 hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Sesuai dengan kriteria yang dikemukakan James Durbin dan Geoffry Watson yaitu jika DW terletak antara Du dan 4-Du maka tidak terjadi autokorelasi.

### 3.6 Hasil Pengujian Hipotesis

**Tabel 9.**  
**Data hasil Regresi Linear**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	19,405	2,865	0,000
Pengelolaan ADD	0,134	0,069	0,004
Kebijakan Desa	0,455	0,020	0,000
Partisipasi Masyarakat	0,138	0,073	0,030

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang sudah dilakukan penelitian pada variabel pengelolaan ADD (X<sub>1</sub>),kebijakan desa (X<sub>2</sub>), partisipasi masyarakat(X<sub>3</sub>) dan pembangunan desa (Y) dapat digambarkan sebagai berikut:

$Y = 19,405 + 0,134$ . Pengelolaan alokasi dana desa + 0,455. Kebijakan desa + 0,138. Partisipasi masyarakat + e  
Perhitungan persamaan linear berganda diatas menunjukkan bahwa:

- a). Konstanta (a) = nilai konstanta sejumlah 19,405 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat bernilai nol maka variabel pembangunan desa sebesar 19,405.
- b). Nilai koefisien regresi untuk variabel pengelolaan alokasi dana desa yaitu 0,134 nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif terhadap pembangunan desa. Artinya jika variabel pengelolaan alokasi dana desa mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka untuk variabel pembangunan desa mengalami kenaikan sebesar 0,134.
- c). Nilai koefisien regresi untuk variabel kebijakan desa sebesar 0,455 artinya variabel kebijakan desa mengalami kenaikan sebesar satu satuan., maka untuk variabel pembangunan desa meningkat sebesar 0,455.
- d). Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,138 artinya jika partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka untuk variabel pembangunan desa mengalami kenaikan sebesar 0,138 dengan variabel independen lainnya dianggap konstan. Sehingga untuk tanda positif tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen.
- e). Error merupakan kemungkinan variabel bebas lain tidak terdapat pada penelitian yang mempengaruhi variabel pembangunan desa.

**3.7 Uji F (Uji Kelayakan Model)**

**Tabel 10.**  
**Hasil Uji F**

F	Sig.
10,008	0,000 <sup>b</sup>

Dapat diketahui berdasarkan tabel 4.12 bahwa untuk menghitung nilai  $F_{tabel}$  yaitu  $F = (k : n - k)$ ,  $F = (3 : 98)$  sehingga memperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 1,661. Pada hasil uji F bahwa untuk nilai  $F_{hitung}$  sebesar 10,008 > 1,661 dan untuk nilai sig. 0,000 < 0,05 maka dinyatakan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian.

**3.8 Uji (t)**

**Tabel 11.**  
**Hasil Uji t**

Variabel	T	Sig.	keterangan
(Constan)	6,774	0,000	Berpengaruh
X1	3,315	0,004	Berpengaruh
X2	3,807	0,000	Berpengaruh
X3	2,357	0,030	Berpengaruh

Diketahui bahwa  $t_{tabel}$  untuk  $df = a/2 : n - k - 1$  ( $df$  residual) = 0,05/2 : 94 = (0,025 : 94) maka hasil  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 sehingga dapat diketahui hasil uji SPSS bahwa :

- a). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa menunjukkan bahwa untuk hasil uji hipotesis dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,315 >  $t_{tabel}$  1,985 dan untuk signifikasinya 0,004 < 0,05. Maka untuk variabel pengelolaan alokasi dana desa secara signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa.
- b). Pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan desa menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis nilai  $t_{hitung}$  3,807 > 1,985 dan nilai signifikasinya 0,000 < 0,05 maka diartikan variabel kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.
- c). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa menyimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  2,357 >  $t_{tabel}$  1,985 dan nilai signifikasinya 0,030 < 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap pembangunan desa.

**3.9. Uji Koefisiensi Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 12**  
**Hasil Data Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,492	0,242	0,218	1,474

Dinyatakan bahwa pada tabel 4.14 diketahui bahwa analisis regresi nilai Adjusted R Square sebesar 0,218 atau 21,8%. Maka diartikan bahwa pembangunan desa dipengaruhi oleh variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat

sebesar 21,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uji kelayakan model secara simultan diketahui bahwa nilai F sebesar 10,008 dan untuk nilai Sig. 0,000 , maka dapat diketahui bahwa untuk model regresi berganda layak digunakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakn desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.
2. Pengaruh pengelolaan alokasi dana diketahui untuk nilai t hitung sebesar 3,315 dengan tingkat nilai signifikasinya  $0,004 < 0,05$  berarti pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Artinya jika ada peningkatan pengelolaan alokasi dana desa maka akan meningkatkan pembangunan desa, begitu sebaliknya jika penurunan pengelolaan alokasi dana desa maka akan menurunkan pembangunan desa. Jadi pengelolaan alokasi dana desa ada hubungan positif terhadap pembangunan desa.
3. Pengaruh kebijakan desa mempunyai nilai t hitung sebesar 3,807 dan nilai signifikasinya sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga variabel kebijakan desa mempunyai hubungan positif terhadap pembangunan desa. Artinya jika ada peningkatan kebijakan desa maka akan menurunkan pembangunan desa. Sehingga dapat ditunjukan bahwa variabel kebijakan desa berhubungan positif secara parsial terhadap pembangunan desa.
4. Pengaruh partisipasi masyarakat mempunyai nilai t hitung sebesar 2,357 dan tingkat nilai signifikasinya sebesar  $0,030 < 0,05$ , berarti untuk variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa.
5. Hasil uji determinasi dinyatakan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,218 atau 21,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh sebesar 21,8% terhadap pemabangunan desa.

#### 6. REFERENSI

- Ariyanti, R. (2022). Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Empiris Pada Warga Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek).
- Dewi, F. G. R., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10, (2): 26–32.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM Edisi kelima SPSS 19.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, (2) : 1–22.
- Pebrianti, G. M. (2021). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARKAT DI DESA SUMOBITO (Studi Kasus Pada Desa Sumobito

Kecamatan Sumobito) (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).

Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3).

Sugiyono, D. (2011). Prof., 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahyuddin, W. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 4(5).